RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan terbitnya Radiogram Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 Februari 2025 Nomor 100.2.1.3/644/SJ Hal tentang Pelantikan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2025, serta menindaklanjuti ketentuan pasal 47 ayat 1 dan pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Perangkat Kerja untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan hal tersebut maka, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2025, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah termasuk dinamika berkembangnya, aspirasi masyarakat.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan sektor perindustrian dan perdagangan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Nganjuk

1.2. **Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

13. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Undang- undang Nomor 06 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
16. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat- syarat bagi Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3283 ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 46 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3743);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang standarisasi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 199 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4020) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 103 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4126);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan dokumen resminya terbit dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, lengkap dengan Penjelasan PP tersebut yang diterbitkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402. ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diterbitkan dalam Lembaran Negara (LN) Tahun 2008 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4890 pada tanggal 28 Agustus 2008. ;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang izin usaha industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 329 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5797);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6133)

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2018 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak dan retribusi daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri;
35. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
36. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, rehabilitasi, atau Renovasi Pasar rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah
38. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
39. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
40. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender

di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
43. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 115 Tahun 2018 Tentang unit Metrologi Legal;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2029 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
51. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
52. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standart Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
54. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur

Sipil Negara dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN Mengacu Perencanaan Strategis ;

55. Peraturan Mentri Perdagangan No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenteri Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
56. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Tera Dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal;
57. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 2024 Tentang Standart Ukuran Mentrologi Legal;
58. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2850 Tahun 2025 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
59. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha ;
60. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
61. Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang skema sertifikasi Pasar Rakyat;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
63. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18)
64. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27)

67. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7)
69. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
70. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang ketentuan umum dan tata cara Pemungutan retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu ;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2030 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;

c. Memberikan pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, disajikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL .

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN.

1 Latar Belakang Masalah;

2 Landasan Hukum;

3 Maksud dan Tujuan; dan

4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi;

b. Sumber Daya Perangkat Daerah;

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ;

d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; dan

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.

2.2. Permasalahan Pelayanan dan Isue Strategis Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan;

b. Perumusan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan

3.2 Strategi dan arah Kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah;

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2020 Nomor 8) dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 Tanggal 22 Maret tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

I. TUGAS POKOK

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

II. FUNGSI

Dinas Perindustrian dan perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina,

mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. pelaksanaan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah;
h. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
i. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
j. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten;
b. pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin

Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);

c. pelaksanaan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan di bidang perdagangan.

Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan;
b. pelaksanaan penerbitan tanda daftar gudang;
c. pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
d. pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
e. pelaksanaan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
f. pelaksanaan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten;
g. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
h. pelaksanaan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
i. pelaksanaan pengendalian harga, dan stok barang

kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;

j. pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten;

k. pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten;

l. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan,membina,mengawasi,mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum di bidang sarana distribusi perdagangan.

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

b. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Metrologi Legal

Bidang Metrologi Legal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum di bidang metrologi legal.

Bidang Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan metrologi legal, berupa teradan tera ulang;

b. pelaksanaan pengawasan, penyuluhan dan penyidikan

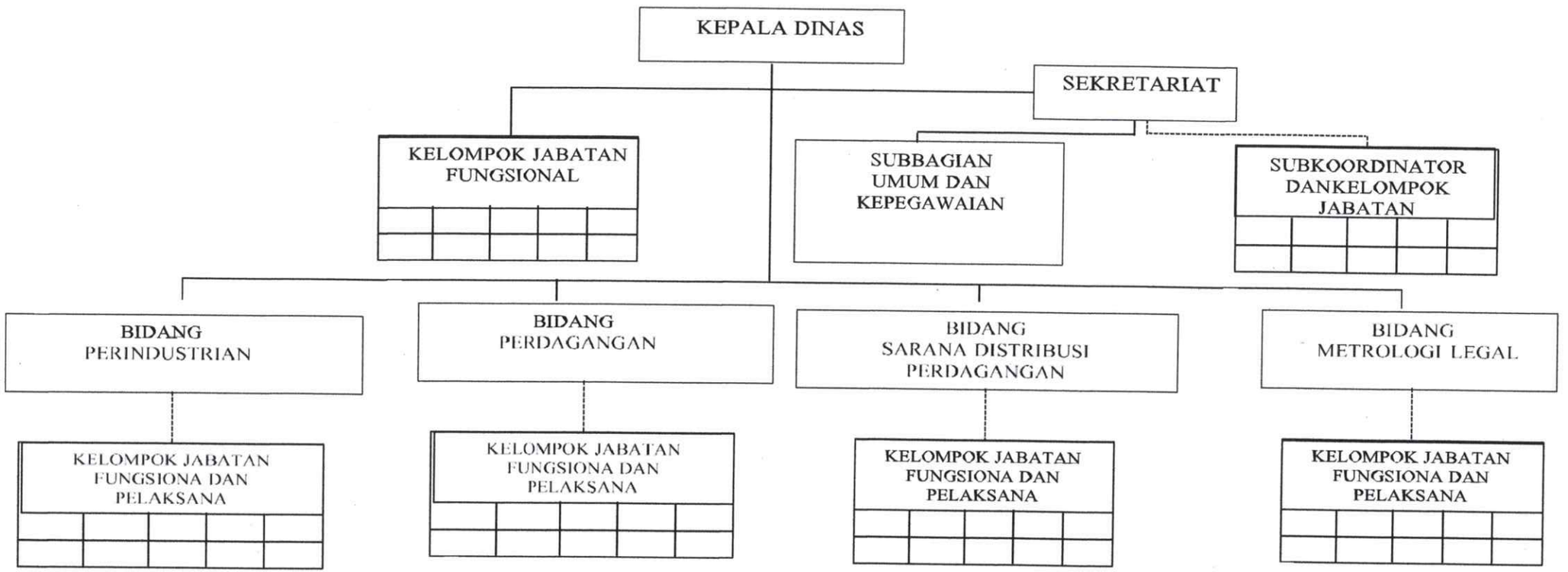
metrologi legal; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk per Juni Tahun 2025 sebanyak 64 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 158 orang

Data pegawai menurut Golongan dan Jabatan adalah

a. Aparatur Sipil Negara

Tabel 2.1
Data Administrasi Kepegawaian
Menurut Golongan dan Jabatan

U R A I A N	Satuan	JENIS KELAMIN		Jumlah
a. Jumlah PNS		P	L	
1) Golongan I	Orang	-	2	2
2) Golongan II	Orang	3	10	13
3) Golongan III	Orang	16	22	38
4) Golongan IV	Orang	3	1	4
Jumlah	**Orang**	**25**	**39**	**64**
b. Jumlah Pejabat Struktural				
1) Eselon II	Orang	1	-	1
2) Eselon III	Orang	3	1	4
3) Eselon IV	Orang	1	-	1
c. Jumlah Pejabat Fungsional	Orang	6	8	14
d. Jumlah Staf PNS	Orang	14	30	44
Jumlah	Orang	**25**	**39**	**64**

Sedangkan data pegawai menurut jenjang pendidikan yang pernah dilalui adalah :

Tabel 2.2

Data Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan

No.	U R A I A N	Satuan	Jumlah	DATA PILAH	
				P	L
1	Lulusan SD	Orang	1	-	1
2	Lulusan SLTP	Orang	2	-	2
3	Lulusan SLTA	Orang	26	7	19
4	Lulusan Paket C	Orang	3	-	3
7	Lulusan S-1	Orang	28	14	14
8	Llusan Pasca Sarjana/ S.2	Orang	4	4	0
Jumlah		**Orang**	**64**	**25**	**39**

b. Tenaga Harian Lepas

Jumlah Tenaga Harian Lepas pada tahun 2025 adalah 158 orang. Tenaga Harian Lepas tersebut berada di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sejumlah 18 orang dan sejumlah 140 orang bekerja di 35 pasar Kabupaten Nganjuk. Dengan jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Satuan	Jumlah	Data Pilah	
				P	L
1	Tenaga Kebersihan	Orang	61	4	57
2	Tenaga Administrasi	Orang	79	19	59
3	Tenaga Keamanan	Orang	11	-	11
4	Tenaga Operator Komputer	Orang	7	3	4
	Total		158	26	131

Sedangkan data tenaga harian Lepas menurut jenjang pendidikan yang pernah dilalui adalah :

No.	U R A I A N	Satuan	Jumlah	DATA PILAH	
				P	L
1	Lulusan SD	Orang	16	2	14
2	Lulusan SLTP	Orang	26	24	2
3	Lulusan SLTA	Orang	87	13	74
4	Lulusan Paket C	Orang	12	1	11
5	Lulusan D-2	Orang	2	-	2
6	Lulusan S-1	Orang	15	8	7
Jumlah		**Orang**	**158**	**48**	**110**

1. Sarana dan Prasarana

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Nganjuk menempati gedung dengan Luas bangunan yang 1.414 m^2 dan 1 gedung untuk pertemuan seluas 280m^2, Gedung tersebut masih kurang memadai karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk juga memberikan pelayanan kemetrologian dan pasar yang membutuhkan tempat untuk menyimpan peralatan dan karcis retribusi pasar. kondisi ini belum cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat membutuhkan pelayanan dan koordinasi, Namun demikian masih diperlukan adanya tambahan prasarana seperti komputer dan printer serta Laptop yang saat ini belum mencukupi dengan beban tugas yang ada. Sedangkan untuk mobilitas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, mobil dinas roda 4 (empat) sejumlah 2 (Dua) dalam keadaan baik, Kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor yang ada sebanyak 6 (Enam) unit dalam keadaan baik, Kendaraan Roda 3 sejumlah 11. Roda 3 sejumlah 10 dalam keadaan baik dan 1 perlu adanya perbaikan .Pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana Daerah yang bersifat fisik. Tercukupinya Penyediaan sarana dan prasarana pendukung akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1 Data dan Informasi Urusan Perindustrian dan Perdagangan

- **Urusan Perindustrian**

Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri non formal (rumahtangga) di berbagai wilayah Kabupaten Nganjuk, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri formal juga mengalami tren yang terus naik. Dengan adanya berbagai pembinaan dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri kecil yang memiliki legalitas usaha. Demikian Perkembangan jumlah industri formal dan informal tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 Sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Jumlah Industri Formal dan Non Formal Tahun 2020-2024

Jenis Data						
a. Industri Non Formal						
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Unit usaha	15.428	15.451	15.493	16.268	16.280
2	Tenaga Kerja	44.236	44.280	44.374	44.424	44.486
3	Nilai Produksi	1.887.993.501	1.888.393.501	1.889.343.501	1.889.893.501	1.892.539.352
4	Nilai Inves-tasi	566.398.050	566.518.050	566.803.050	566.968.050	567.761.806
b. Industri Formal						
1	Unit usaha	1.331	1.327	1.369	1.530	1.563
2	Tenaga Kerja	17.702	17.724	17.812	18.520	18.890
3	Nilai Produksi	4.352.363.664	4.456.560.899	4.580.606.499	4.710.106.499	4.846.060.648
4	Nilai Inves-tasi	1.305.709.099	1.336.968.270	1.374.181.950	1.413.031.950	1.453.818.194

- **Urusan Perdagangan**

1. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri (domestik) dan juga perdagangan luar negeri (ekspor) dimana keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi perdagangan. Berikut rekapitulasi data di bidang perdagangan tahun 2019-2024 seperti pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Nilai Ekspor

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Ekspor	38.640.852.988	50.100.000.000	16,651.815.394,76	9.450.480.000.000	1.963.624.424.587

2. Bidang Metrologi

Dengan terbitnya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Nomor : 56/PKTN/KKPTTU/08/2018 dan

diperbarui dengan terbitnya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Nomor : MR.04.01 / 86 / PKTN.4 / KKPTTU / 12 / 2024 dan berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Unit Metrologi Legal (UML) oleh Tim Penilai, maka Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mampu melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sesuai lingkup :

1) Meter Kayu, Timbangan Otomatis, Timbangan Bukan Otomatis, dan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak ;
2) Ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang UTTP pada No. 1 meliputi :

Tabel 2.5

Ruang Lingkup Dan Daftar Standar Ukuran Yang Dimiliki

NO	RINCIAN UTTP	PERALATAN DAN STANDAR UKURAN YANG DIMILIKI/ DIGUNAKAN
1	METER KAYU	Meter Kerja 1000 mm/1 mm
2	TAKARAN KERING	Bourje Jangka Sorong
3	TAKARAN BASAH	
4	WEIGHING IN MOTION (TIMBANGAN KENDARAAN BERGERAK)	- Timbangan Jembatan - Anak Timbangan Bidur Kelas M2 - Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1 kg) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 1 kg) - Anak Timbangan Kelas M1 (20 kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100 mg – 1 kg) 2 set - Anak Timbangan Kelas M2 (1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (1 kg, 2 kg, 2 kg, 5 kg,10 kg) - Anak Timbangan Bidur Kelas M2 @20 kg (400 unit) - Standar Anak Timbangan Dacin Kelas M1 s.d 110 kg dan Tripod
5	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS II, KELAS III DAN KELAS IIII (TERMASUK TIMBANGAN JEMBATAN)	
6	TIMBANGAN PEGAS	
7	TIMBANGAN CEPAT	
8	TIMBANGAN CEPAT MEJA	
9	NERACA	
10	DACIN	
11	TIMBANGAN MILISIMAL	
12	TIMBANGAN SENTISIMAL	
13	TIMBANGAN DESIMAL	
14	TIMBANGAN BOBOT INGSUT	
15	TIMBANGAN MEJA BERANGER	

16	POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK	- Bejana Ukur Standar 5 L, 10 L dan 20 L - Gelas Ukur 1000 L/10 mL - Landasan Bejana Ukur - Penyipat Datar - Stopwatch - Termometer
17	ANAK TIMBANGAN SEBAGAI PERLENGKAPAN TIMBANGAN MEJA, NERACA DAN SENTISIMAL	- Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1 kg) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 1 kg) - Anak Timbangan Kelas M1 (20 kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100 mg – 1 kg) 2 set - Anak Timbangan Kelas M2 (1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (1 kg, 2 kg, 2 kg, 5 kg,10 kg) - Timbangan Elektronik kapasitas 220 g/0,0001 g - Timbangan Elektronik kapasitas 2000 g/0,001 g - Timbangan Elektronik kapasitas 6200 g/0,01 g - Timbangan Elektronik kapasitas 12200 g/0,01 g - Timbangan Elektronik kapasitas 32200 g/1 g

Adapun Jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan tahun 2020-2024 adalah seperti pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Jumlah UTTP

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah UTTP	Unit	15.245	11.373	9.597	9.653	8.761

3 Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk peningkatan manajemen pengelolaan pasar dan disiplin pedagang di dalam lingkungan pasar sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan secara berkesinambungan. Retribusi pelayanan pasar terdiri dari Biaya balik nama dan perpanjangan SK Hak ijin Pakai atas Toko, Bedag tepi/luar,bedag dalam Los, dibawah los, pelataran, Penitipan Kendaraan serta Ternak dalam Pasar. Adapun data tentang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2020-2024 adalah seperti pada tabel 2.7 berikut terlampir ;

TABEL 2.7
Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar dan Kebersihan Tahun 2020 – 2024
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

NO	URAIAN	SATUAN	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Bedag tepi /luar	Rp	1.165.231.475,67	1.598.342.153,80	1.583.084.763,46	1.670.786.062,65	2.371.835.545,50
2	Bedag dalam	Rp	538.914.661,00	736.691.800,00	1.094.309.400,00	1.235.094.000,00	1.795.194.600,00
3	Bedag dalam los	Rp	491.850.900,00	615.613.400,00	726.525.000,00	817.149.500,00	1.168.829.000,00
4	Di bawah Los	Rp	495.770.220,00	689.486.000,00	971.666.900,00	1.118.463.400,00	1.591.462.850,00
5	Pelataran	Rp	127.723.150,00	178.237.200,00	191.854.100,00	201.250.400,00	330.201.200,00
6	Ijin tempat	Rp	245.169.334,48	256.731.475,76	250.701.439,33	248.750.166,18	-
7	Penitipan kendaraan	Rp	116.375.000,00	172.444.000,00	164.032.500,00	199.653.000,00	318.184.800,00
8	Ternak	Rp	47.832.500,00	64.899.000,00	151.842.500,00	199.479.000,00	275.322.500,00
9	BBN (Bea Balik Nama)	Rp	16.739.306,00	46.376.060,00	27.773.421,00	34.611.237,00	1.906.030,00
10	Kebersihan	Rp	185.508.000,00	252.608.000,00	258.528.600,00	291.490.100,00	719.045.600,00
JUMLAH		**Rp**	**3.431.114.547,15**	**4.611.429.089,56**	**5.420.318.623,79**	**6.016.726.865,83**	**8.571.982.125,50**

2. Data Evaluasi Capaian Kinerja Iku Dan Ikk

- DATA EVALUASI CAPAIAN KINERJA IKU

Tabel 2.8
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 -2020

No	Indikator	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2020						
		Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			KET
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	5	6	7	11	12	13	
1	Persentase IKM yang terstandarisasi	15,97	18,50	18,90	15,97	18,13	19,14	
2	Persentase Pertumbuhan usaha Industri	1,57	1,67	1,77	1,57	1,62	1,70	
3	Persentase Pertumbuhan IKM berbasis Produk Lokal	6,16	6,28	6,38	6,16	6,20	5,51	

4	Volume Usaha Perdagangan dalam Negeri	1,24	5,76	5,78	1,20	5,70	5,69	
5	Nilai Ekspor	43	45	47	45	48	38	

Tabel 2.9
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	1,97%	2,00	101,52	2.01	2,05	101,99
		Persentase Hasil Pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah	73,68%	75,00	101,79	75,00	76,47	101,96
2	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Fasilitasi izin usaha perdagangan	90,00%	91,30	101,44	90,00	100	111,11
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	90,00%	98,38	109,31	90,00	96,44	107,16
		Presentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	5,98%	6,57	109,87	6,00	6,03	100,5
		Presentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	85,55%	53,32	62,33	86,11	55,28	64,20

Tabel 2.10
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Sebelum Reviu

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan Pertumbuhan sektor industri	Persentase Pertumbuhan industri Kecil dan Menengah	2,1	2,15	102,38
2	Meningkatnya Pertumbuhan sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan omzet sektor Perdagangan	6,1	6,03	98,85

Tabel 2.11
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Sesudah Reviu

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Ca-paian
1.	Meningkatnya Nilai Produktivitas industri	Persentase Peningkatan Nilai produksi sector industri	2,1	2,15	102,38
2	Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan	Persentase peningkatkan omzet sektor perdagangan	1,68	2,05	122,02

- DATA EVALUASI CAPAIAN KINERJA IKK

Tabel 2.12

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator IKK		Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian					
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan											
1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten	0,49%	1,87%	1,97%	2,01%	2.15	0,49%	1,97%	0,95%	0,62%	2,15%	
2	Persentase Terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	82,0%	90%	90%	90%	93,97%	82,01%	95,83%	96.35%	96,44%	81,96%	
5.	Persentase alat-alat ukur, takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku	88,30%	85,00	85,55	86,11	85,00	63,52%	47,39%	53,31%	99,50%	89,12%	
6.	Persentase Pengembangandan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan diwilayah Kerjanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	

d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat luas, mencakup semua pihak yang berkepentingan dalam sektor industri dan Perdagangan. termasuk industri kecil dan menengah, pedagang (eceran, grosir), konsumen, dan masyarakat umum. Dinas juga melayani instansi pemerintah terkait, dan organisasi profesi di bidang industri dan perdagangan.

- **Pelaku Industri:**

  Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelayanan dan dukungan kepada pelaku usaha Industri meliputi perizinan usaha bagi industri Kecil dan Menengah, pengembangan produk, pembinaan SDM, fasilitasi akses pasar, pengembangan teknologi dan kepatuhan Pelaku usaha industry.

- **Pelaku usaha Perdagangan:**

  Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelayanan kepada Pelaku usaha perdagangan, baik pedagang ritel, pedagang grosir, maupun pedagang di pasar rakyat. Pelayanan ini meliputi perizinan usaha perdagangan, pembinaan pedagang, pengawasan kualitas produk

- **Konsumen:**

  Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki peran penting dalam melindungi konsumen. Ini meliputi pengawasan kualitas produk, pengawasan Bapokting dan stabilisasi harga , Pengawasan Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pelayanan Tera/tera ulang alat Ukur takar timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

- **Masyarakat Umum:**

  Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai sektor industri dan perdagangan kepada masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebaran informasi melalui berbagai media.

- **Pemerintah dan Lembaga Terkait:**

  Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lembaga Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang industri dan perdagangan. Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di sektor industri dan perdagangan.

- **Organisasi Profesi:**

  Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menjalin hubungan dengan organisasi profesi di bidang industri dan perdagangan, seperti asosiasi industri, asosiasi

pedagang, dan organisasi profesi lainnya. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme di sektor industri dan perdagangan.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra dalam pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dapat berupa berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha dan perdagangan di wilayah tersebut. Beberapa mitra penting terdiri dari mitra dari organisasi Pemerintah dan non pemerintah meliputi pelaku usaha, asosiasi, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait.

A. Mitra Organisasi Pemerintah

1 Kementerian Perindustrian (Kemenperin): Kemenperin adalah mitra utama dan terpenting bagi Disperindag dalam hal kebijakan, regulasi, dan program di bidang industri.

2 Kementerian Perdagangan (Kemendag): Kemendag menjadi mitra penting dalam hal regulasi perdagangan, pasar, promosi produk lokal dan Perlindungan Konsumen

3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menjadi mitra penting dalam hal koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, regulasi, dan program di bidang industri dan perdagangan.

4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan antara DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Disperindag (Dinas Perdagangan dan Industri) sangat erat, terutama dalam hal perizinan usaha. DPMPTSP bertugas sebagai pintu tunggal perizinan, sementara Disperindag memiliki peran penting dalam hal regulasi dan pengawasan perdagangan serta industri di daerah. Untuk memastikan efektivitas pelayanan perizinan dan pengawasan, DPMPTSP dan Disperindag perlu melakukan koordinasi dan sinergi. Misalnya, DPMPTSP akan merujuk permohonan izin ke Disperindag jika diperlukan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan terkait izin tersebut. DPMPTSP dan Disperindag bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempermudah pengurusan perizinan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan dan industri.

5 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Disperindag dan Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

6 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Menjadi mitra Disperindag terkait dengan kesesuaian tata ruang dan bangunan dalam Kawasan peruntukan industry dan perdagangan termasuk jasaserta mitra dalam penyediaan informasi untuk Pengembangan tata ruang dan Pembangunan lainnya

7 Dinas Lingkungan Hidup

Menjalin Kerjasama dan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan pada industry dan perdagangan serta mitra dalam pengawasan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

8 Dinas Tenaga Kerja

Sebagai mitra dalam ketersediaan tenaga kerja dan penumbuhan wirausahabaru serta sinergitas pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat pencari kerja

9 Dinas Pertanian

Dinas Pertanian fokus pada produksi pangan dan bahan baku, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam pengolahan, pemasaran, dan distribusi produk tersebut. Keduanya bekerja sama untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memastikan ketersediaan serta stabilitas harga pangan. Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran penting dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dinas Pertanian bertanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan, dan penyuluhan terkait penggunaan pupuk, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk, termasuk pengawasan terhadap harga dan pengecer.

10 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama untuk memastikan ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri terkait.

11 BPJS Ketenagakerjaan

Terkait pelayanan di bidang sarana distribusi Perdagangan dengan Pedagang untuk memberikan jaminan perlindungan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

12 Kejaksaan Negeri

Secara keseluruhan, hubungan antara Kejaksaan Negeri dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah hubungan yang saling mendukung dalam rangka

menjaga iklim usaha yang sehat dan kondusif serta penegakan hukum di bidang industri dan perdagangan.

13 TNI Polri

Keikutsertaan anggota TNI dan Polri dalam kegiatan TMMD ini merupakan bentuk sinergitas TNI-Polri terutama dalam mendukung program pembangunan dan Kegiatan Pengawasan

B. Mitra Organisasi Non Pemerintah

1. **Pelaku Usaha:**

   Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta pelaku usaha skala besar merupakan mitra utama dalam kegiatan usaha. Mereka membutuhkan pelayanan dan dukungan dari Disperindag untuk pengembangan usaha, pemasaran produk, dan peningkatan kualitas.

2. **Asosiasi:**

   Asosiasi industri, perdagangan, atau asosiasi komoditi tertentu berperan penting sebagai mitra dalam memberikan masukan, saran, dan koordinasi dalam kegiatan usaha. Mereka dapat memberikan informasi terkait kebutuhan industri, regulasi, dan peluang pasar kepada Disperindag.

3. **Lembaga Pendidikan:**

   Lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan lembaga kursus, dapat menjadi mitra dalam memberikan pelatihan, pengembangan SDM, dan riset terkait bidang perindustrian dan perdagangan. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan inovasi di bidang usaha.

4. **Organisasi Non-Pemerintah (ONGK):**

   ONGK, seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau komunitas yang berfokus pada pengembangan UMKM, dapat menjadi mitra dalam memberikan dukungan teknis, konsultasi, dan pendanaan untuk pengembangan usaha. Mereka dapat membantu memberikan akses kepada UMKM terhadap berbagai program dan bantuan.

5. **Pihak Terkait Lainnya:**

   Mitra lainnya dapat berupa pihak yang terlibat dalam penyediaan infrastruktur, layanan logistik, lembaga keuangan, dan pihak yang memberikan fasilitasi lainnya terkait kegiatan usaha dan perdagangan. Mereka dapat berperan dalam mendukung kelancaran operasional dan pengembangan usaha.

2.2. Permasalahan Pelayanan dan Isue Strategis Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan

1. Masih rendahnya daya saing industri;
2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industry daerah dan klister industry serta produk unggulan;
3. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi atas produk yang dihasilkan;
4. Kondisi fisik pasar yang tidak nyaman (Gedung tua, sanitasi buruk, aksesibilitas terbatas, kurangnya lahan parker) mengurangi daya Tarik pasar dan kenyamanan pedagang serta pembeli;
5. Sistem data dan informasi perdagangan yang belum terintegrasi dan belum bisa disajikan secara real time kualitas produk;
6. Belim optimalnya pengendalian terhadap toko modern yang berjaringan nasional;
7. Belum optimalnya pelayanan tera/ tera ulang dan kurang optimalnya pengawasan wajib tera/tera ulang.

b. Perumusan isu strategis

1. Peningkatan daya saing industry melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), Penguasaan teknologi dan standarisasi produk;
2. Pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industry daerah dan klaster industry serta produk unggulan;
3. Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi atas produk yang di hasilkan;
4. Peningkatan kualitas kondisi fisik pasar rakyat.

Dengan teknik menyimpulkan permasalahan dan isu strategis sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.13 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya nilai tambah sektor perin-dustrian dan perdagangan	1. Masih rendahnya daya saing industri	Kurang optimalnya pengentasan kemiskinan	1. Persaingan ekonomi a. Perang dagang dan dampaknya terhadap ekonomi global b. Tarif dan hambatan perdagangan c. Perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap daya saing ekonomi d. Ketergantungan pada tarif impor dan fluktuasi harga global e. Perdagangan manusia dalam ekonomi global	1. Pemberdayaan Ekonomi a. Peningkatan kesempatan kerja b. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia c. Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan inklusif d. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan regional	1. Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	1. Peningkatan daya saing industry melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), Penguasaan teknologi dan standarisasi produk
	2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industry daerah dan klister industry serta produk unggulan					2. Pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industry daerah dan klaster industry serta produk unggulan
	3. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi					3. Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi atas produk yang di

	atas produk yang dihasilkan					hasilkan
	4. Kondisi fisik pasar yang tidak nyaman (Gedung tua, sanitasi buruk, aksesibilitas terbatas, kurangnya lahan parker) mengurangi daya Tarik pasar dan kenyamanan pedagang serta pembeli					4. Peningkatan kualitas kondisi fik pasar rakyat
	5. Sistem data dan informasi perdagangan yang belum terintegrasi dan belum bisa disajikan secara real time kualitas produk					
	6. Belim optimalnya pengendalian terhadap toko modern yang berjaringan nasional					
	7. Belum optimalnya pelayanan tera/ tera ulang dan kurang optimalnya pengawasan wajib tera/tera ulang					

BAB III
TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

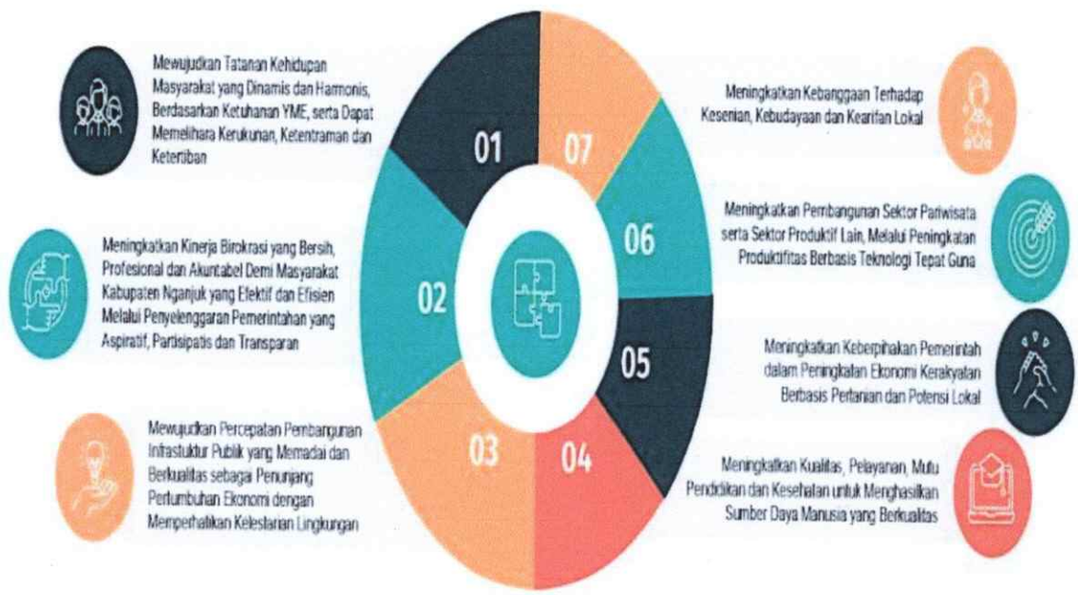
3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi yang ditetapkan dalam dokumen ini berperan sebagai fondasi utama dalam menentukan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, visi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing, sehingga Kabupaten Nganjuk dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Visi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah :

"Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat"

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Nganjuk sebagai disajikan dalam gambar berikut:

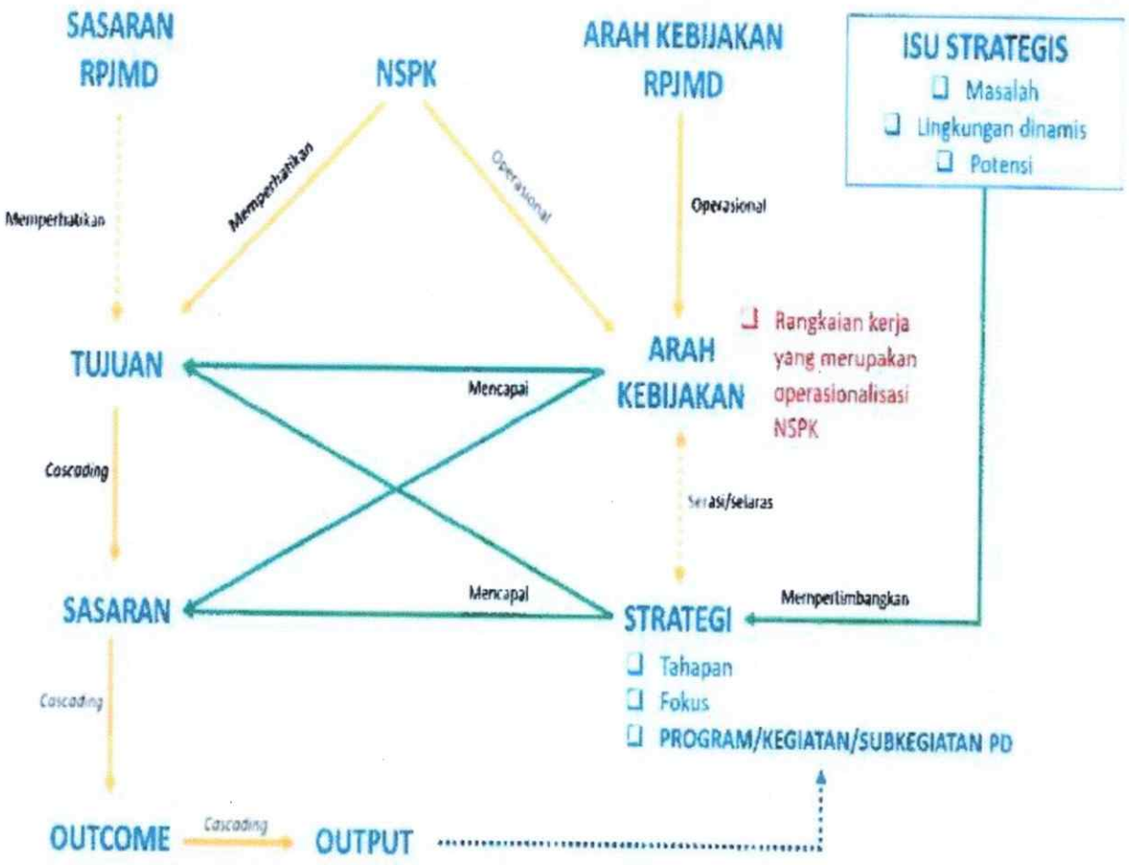
Gambar 3.1. Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk



Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 yang diemban Kabupaten Nganjuk yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2024.Dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif dan berkelanjutan , dalam

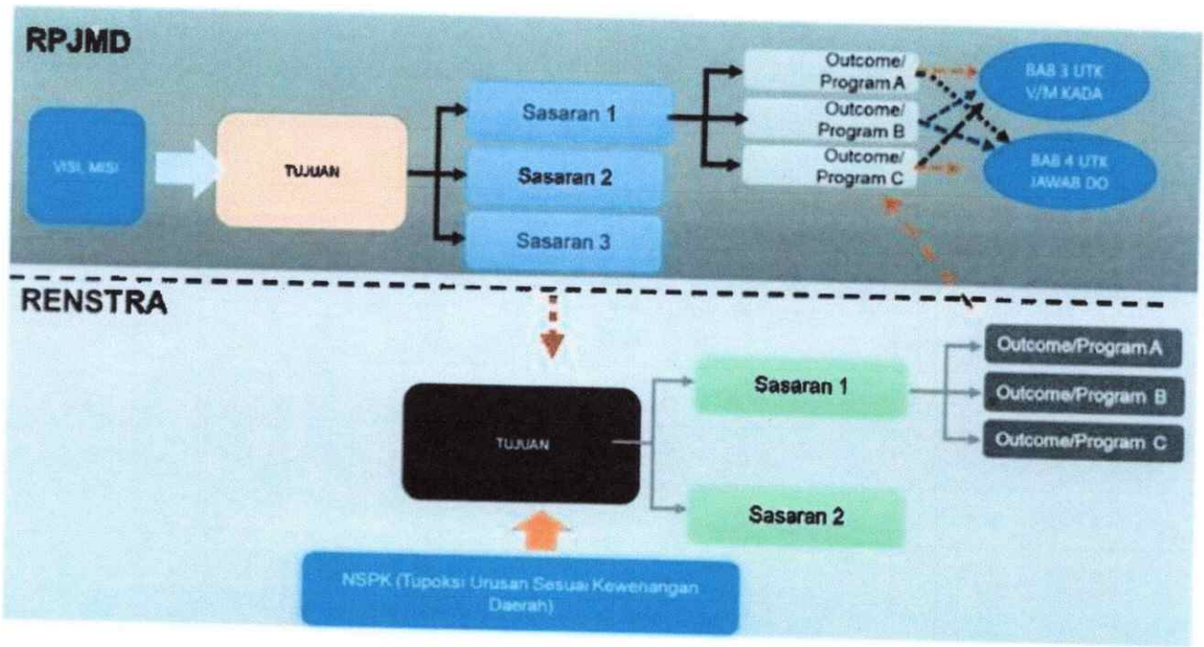
Mencapai tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan misi ke 5 **"Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal"**

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran

RPJMD Dengan Tujuan Renstra PD



Keterkaitan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Nganjuk secara umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada khususnya dalam keterkaitan tehadap peran Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Adapun tujuan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 adalah :

"Meningkatnya nilai tambah sektor Perindustrian dan Perdagangan"
Dengan indikator kinerja

1. Rasio PDRB (ADHK) Sektor Industri Pengolahan
2. Rasio PDRB (ADHK) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Baseline Data Rasio PDRB (ADHK) sector Industri Pengolahan dan Rasio PDRB (ADHK) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2024 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Nganjuk yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Produktivitas Industri dengan Indikator : Persentase peningkatan nilai produksi Industri

   Alasan : Untuk Mengukur Peningkatan nilai produksi yang ada di Kabupaten Nganjuk

   Sumber Data : Bidang Perindustrian

   Data dasar pada indicator ini Diperoleh dari Updating Data Tahun 2021 Yang dimaksud Nilai Produksi adalah Tingkat produksi, atau jumlah barang yang dihasilkan dari industri.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Perdagangan dengan Indikator :
   Persentase Peningkatan Nilai sector Perdagangan

   Alasan : Untuk mengukur Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk

Tujuan, Sasaran, dan Indikatornya dapat dilihat pada tabel 3.3 Sebagai Berikut :

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELE-VAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan											
Meningkatnya nilai tambah sektor perin-dustrian dan perdagangan	Meningkatnya nilai tambah sektor Perin-dustrian dan Perdagangan		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15.84	16.27	16.61	16.96	17.30	17.65	17.71	
			Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Mo-tor (%)	20.53	20.54	20.55	20.57	20.60	20.62	20.64	
		Meningkatnya Nilai Produktivitas industri	Persentase pening-katan Nilai Produksi industri (%)	2.15	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	
		Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan	Persentase pening-katan Nilai sektor perdagangan (%)	6.61	6.78	6.96	7.14	7.33	7.51	7.69	

keberhasilan implementasi arah kebijakan sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antar perangkat daerah, sinergi dengan pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkala menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Secara lebih rinci, pentahapan pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4 di bawah ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perencanaan dan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penahapan Pembagunan adalah Prioritas Pembanguanan Tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat disajikan seperti pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.2 PENAHAPAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5
Penguatan Pondasi Pelaku usaha dalam Meningkatkan Produksi	Pengelolaan Sektor Industri dan Perdagangan	Penguatan Kolaborasi Hexahelic	Meningkatkan Produksi Sektor Industri dan Perdagangan	Pemantapan Transformasi Sektor Industri dan Perdagangan
Memfasilitasi Pelaku Industri dalam Memperoleh sertifikasi standar , Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja industri dengan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan sesuai kebutuhan industri serta Meningkatkan kerja sama perdagangan antar daerah dan ekspor, dengan menjalin kemitraan strategis dengan distributor dan jaringan ritel nasional maupun internasional serta Peningkatan Kesadaran Pemilik UTTP untuk menera/menera ulangkan Alat ukur takar timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Revitalisasi pasar Sukomoro Penyusunan DED Revitalisasi pasar dan revitalisasi pasar non fisik dengan peningkatan manajemen pengelolaan Pasar	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas perwilayahan industry -dan Membangun kerja sama dengan jaringan ritel modern dan pasar ekspor, untuk memperluas jangkauan distribusi produk industry serta berkolaborasi dengan paguyupan pasar rakyat dalam peningkatan Tera/Tera ulang UTTP Pembangunan pagar pasar Wage Baru,Pasar Tawang , , DED Revitalisasi Pasar serta peningkatan manajemen pengelolaan Pasar	Mengadakan pameran dan expo industri secara berkala, untuk mempromosikan produk lokal ke pasar yang lebih luas serta Mendorong pemasaran produk industri melalui e- commerce dan marketplace digital, agar produk lokal dapat menjangkau pasar nasional dan internasional. serta Mendorong industri kecil menengah (IKM) di sektor pangan agar dapat mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Meningkatkan Kerjasama Perdagangan antar daerah dan ekspor dengan menjalin kemitraan strategis dengan distributor dan jaringan ritel nasional maupun internasional Mendorong pelaku usaha/pemilik UTTP untuk tera/tera ulang secara berkala guna menjaga akurasi pengukuran agar dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa di pasar global. Revitalisasi pasar Sukomoro dan DED Revitalisasi Pasar serta peningkatan manajemen pengelolaan Pasar	Tahap ini merupakan Perwujudan Tujuan Renstra yang ditandai Peningkatan Produksi sektor Perindustrian dan Perdagangan serta mendorong terjadinya aglomerasi Industri dan Perdagangan yang semakin massif dari daerah sekitar dengan pelaku usaha/masyarakat Kabupaten Nganjuk. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui penetapan standar mutu yang terjamin. Revitalisasi pasar Lengkong dan DED Revitalisasi Pasar serta peningkatan manajemen pengelolaan Pasar	Pada tahap ini merupakan periodesasi Kepala Daerah Baru, yang dijabarkan sesuai dengan Visi-Misi Pembangunan jangka menengah tahun 2030-2035. Revitalisasi pasar Payaman dan DED Revitalisasi Pasar serta peningkatan manajemen pengelolaan Pasar

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai *(strategy objective)*. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja; strategi harus dikendalikan dan dievaluasi *(learning process)*.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Rumusan Pernyataan Tujuan,Sasaran,strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun mendatang pada tabel 3.5 berikut

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	Meningkatnya nilai tambah sektor perindustrian dan perdagangan	Percepatan Pembangunan Perekonomian Kabupaten Nganjuk	Penguatan daya saing industri dan Perdagangan	
		"Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Peningkatan Pengelolaan sektor Industri dan Perdagangan	
		1. Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah untuk Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi	Membina dan memfasilitasi usaha industri kecil dan menengah (IKM) dalam rangka pengembangan industri	
		2.Penguatan Limpahan Kesejahteraan Ekonomi	Pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah , klaster industri dan produk unggulan serta peningkatan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	
		3.Ekspansi Ekonomi Lintas Daerah untuk Meningkatkan Ekspor dan Surplus Perdagangan Antar Daerah	penguatan daya saing produk lokal, peningkatan kualitas dan standar produk sesuai dengan permintaan pasar global, serta pengembangan jaringan perdagangan dan logistik	

BAB IV

PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Urusan Perindustrian

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan menengah Melalui Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Industri, fasilitasi sarana dan Prasarana bagi Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat

2. Program Pengendalian Izin usaha Industri

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis SIINAS

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Pengelolaan sistem informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI melalui Pengumpulan, Pengolahan, analisis Data Industri, Diseminasi dan Publikasi data informasi serta Pemantaun dan Evaluasi kepatuhan Industri

b. Urusan Perdagangan

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase fasilitasi izin Penerbitan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, Penerbitan Surat izin

usaha Perdagangan Minuman beralkohol Golongan B dan C serta Pengendalian fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan Pengawasan

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

   Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan serta Pembinaan, Pengendalian dan Pemberdayaan pengelola sarana Distribusi Perdagangan

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

   Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Pengawasan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaa, PengendalianHarga dan Stok barang kebutuhan Pokok dan barang Penting lainnya serta Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi.

4. Program Pengembangan Ekspor

   Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase Peningkatan fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor melalui Penyelenggaraan promosi dagang, pameran dagang, misi dagang dan pembinaan bagi pelaku ekspor.

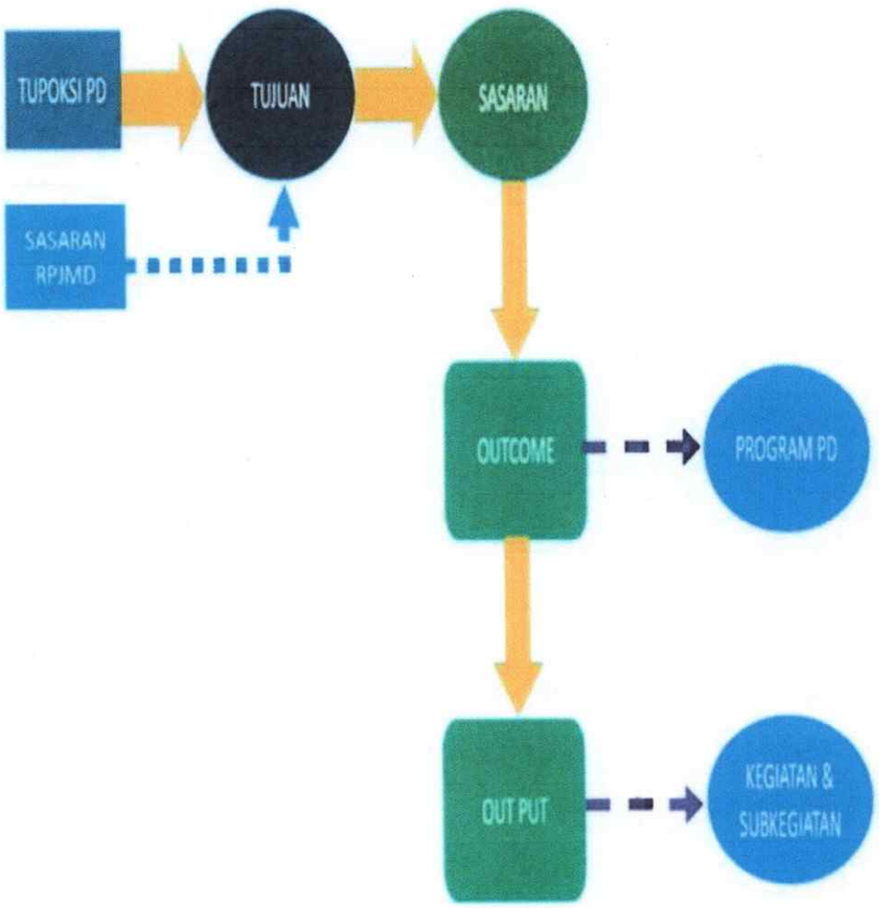
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

   Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Alat - alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku serta Pengawasan/penyuluhan metrologi legal .

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

   Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri. Melalui Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan



TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGHAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
- Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan	Meningkatnya nilai tambah sektor Perindustrian dan Perdagangan				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
					Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)		
		Meningkatnya Nilai Produktivitas industri			Persentase peningkatan Nilai Produksi industri (%)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.31.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.31.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.31.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.31.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.31.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.31.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.31.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersusunnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.31.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				tersedianya peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang layak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				tersusunnya laporan penatusahaan perkantoran yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.31.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.31.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.31.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa pelayanan Perkantoran yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.31.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.31.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar-kan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.31.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Ken-daraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipeli-hara dan Dibayarkan Perizi-nannya (Unit)	3.31.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Per-izinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Mebel yang Dipeli-hara (Unit)	3.31.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.31.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di-pelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.31.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabil-itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasa-rana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di-pelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.31.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabil-itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasa-rana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire-habilitasi (Unit)	3.31.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabil-itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas produk industri		Persentase produk IKM yang bersertifikasi (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN IN-DUSTRI	
				Tersusunnya Doku-men Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah pro-gram pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Doku-men)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Eval-uasi Rencana Pem-bangunan Industri Ka-bupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kemudahan perizinan IKM		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya kepatuhan pelaporan usaha industri		Persentase usaha industri yang patuh melaporkan dalam SIINAS (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Tersedianya Informasi Industri dan Pengelolaan Data Dalam SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
			Meningkatnya pertumbuhan usaha industri		Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Terbentuknya perwilayahan industri		Persentase perwilayahan industri yang terbentuk (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	3.31.02.2.01.0007 - Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan)	3.31.02.2.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	3.31.02.2.01.0010 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Meningkatnya produk IKM yang diajukan sertifikasi		Persentase produk IKM yang layak difasilitasi sertifikasi (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Meningkatnya penggunaan sarpras yang berkualitas		Persentase IKM yang memiliki sarana prasarana produksi dalam kondisi baik (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
		Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan			Persentase peningkatan Nilai sektor perdagangan (%)		
			Meningkatnya kepatuhan perizinan pelaku usaha perdagangan		Persentase pelaku usaha perdagangan yang taat perizinan (%)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
					Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Tersedianya Rekomendasi dan laporan Hasil pemantauan Perolehan Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, distributor, agen, grosir/perkulaan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	3.30.02.2.01.0002 - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
				Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Terfasilitasinya dan terverifikasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran untuk pemenuhan komitmen lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03.0001 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.03.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	
					Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03.0003 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)	3.30.02.2.03.0004 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya dan terverifikasinya Sistem Pelayanan Perizinan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran untuk pemenuhan lanjutan Waralaba (STPW) luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
					Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)	3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
					Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.04.0001 - Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.04.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.04.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	
					Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)	3.30.02.2.04.0004 - Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	
				Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)	3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
					Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05.0001 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)	3.30.02.2.05.0002 - Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	
				Terlaksananya fasilitasi dan tersedianya laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)	3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak		Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Terkendalinya harga bahan pokok		Koefisien laju harga bapokting (Angka)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
					Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Tersedianya laporan koordinasi dan laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Tersedianya laporan Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler untuk harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya kelengkapan legalitas perizinan dan laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	3.30.04.2.03.0001 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya nilai ekspor		Persentase peningkatan nilai ekspor (%)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada pelaksanaan Promosi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
				Meningkatnya Citra Produk ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
			Meningkatkannya jaminan perlindungan konsumen melalui kepatuhan pemilik UTTP melakukan tera/tera ulang		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
				Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya perluasan pemasaran perdagangan		Persentase pelaku usaha perdagangan yang terakses pasar (%)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan promosi pada produk dalam negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan (matrik Renstra)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				8.667.970.290		8.629.934.620		8.824.134.620		9.016.334.620		13.156.034.620		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				184.217.310		217.254.810		249.854.810		284.454.810		321.554.810		
Meningkatnya kepatuhan perizinan pelaku usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang taat perizinan (%)	18	21,33	184.217.310	23	217.254.810	24,67	249.854.810	26,33	284.454.810	28	321.554.810	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	22,86	26,86		28,86		30,86		32,86		34,86			
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				31.062.500		37.000.000		42.500.000		50.000.000		60.000.000		
Tersedianya Rekomendasi dan laporan Hasil pemantauan Perolehan Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, distributor, agen, grosir/perkulaan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	150	2	31.062.500	2	37.000.000	2	42.500.000	2	50.000.000	2	60.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	200	5		5		5		5		5			
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				16.062.500		20.000.000		22.500.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	150	2	16.062.500	2	20.000.000	2	22.500.000	2	25.000.000	2	30.000.000		
3.30.02.2.01.0002 - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				15.000.000		17.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui	200	5	15.000.000	5	17.000.000	5	20.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sistem Elektronik (laporan)													
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				38.214.810		41.814.810		45.414.810		49.014.810		52.614.810		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	300	10	38.214.810	10	41.814.810	10	45.414.810	10	49.014.810	10	52.614.810		
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				38.214.810		41.814.810		45.414.810		49.014.810		52.614.810		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	300	10	38.214.810	10	41.814.810	10	45.414.810	10	49.014.810	10	52.614.810		
3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				39.940.000		48.440.000		56.940.000		65.440.000		73.940.000		
Terfasilitasinya dan terverifikasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran untuk pemenuhan komitmen lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	5	5	39.940.000	5	48.440.000	5	56.940.000	5	65.440.000	5	73.940.000		
	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba	5	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
3.30.02.2.03.0001 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				9.940.000		10.940.000		11.940.000		12.940.000		13.940.000		
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	5	5	9.940.000	5	10.940.000	5	11.940.000	5	12.940.000	5	13.940.000		
3.30.02.2.03.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	5	5	10.000.000	5	12.500.000	5	15.000.000	5	17.500.000	5	20.000.000		
3.30.02.2.03.0003 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	5	5	10.000.000	5	12.500.000	5	15.000.000	5	17.500.000	5	20.000.000		
3.30.02.2.03.0004 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		
Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)	5	5	10.000.000	5	12.500.000	5	15.000.000	5	17.500.000	5	20.000.000		
3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri				25.000.000		27.500.000		30.000.000		32.500.000		35.000.000		
Terlaksananya dan terverifikasinya Sistem Pelayanan Perizinan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran untuk pemenuhan lanjutan Waralaba (STPW) luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen)	2	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.000.000	2	32.500.000	2	35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUT-COME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizi-nan Surat Tanda Pendaftaran Wa-ralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanju-tan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Doku-men yang Diver-ifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendafta-ran dan/atau Lanjutan Wara-laba (STPW) Luar Negeri (Doku-men)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah doku-men yang di veri-fikasi sebagai Pemenuhan Su-rat Tanda Pen-daftaran Wara-laba (STPW) un-tuk penerima wa-ralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
3.30.02.2.04.0001 - Sis-tem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		
Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizi-nan Lanjutan Surat Tanda Pen-daftaran dan/atau Lanju-tan Waralaba (STPW) Terin-tegrasi Secara El-ektronik Luar Negeri (Doku-men)	2	2	10.000.000	2	12.500.000	2	15.000.000	2	17.500.000	2	20.000.000		
3.30.02.2.04.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
3.30.02.2.04.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
3.30.02.2.04.0004 - Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000		
	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.30.02.2.05.0001 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		
Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	12.500.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02.2.05.0002 - Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		
Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)	1	1	10.000.000	1	12.500.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000		
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				30.000.000		37.500.000		45.000.000		52.500.000		60.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan tersedianya laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	1	1	30.000.000	1	37.500.000	1	45.000.000	1	52.500.000	1	60.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUT-COME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		
Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	1	1	10.000.000	1	12.500.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000		
3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		
Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)	2	2	10.000.000	2	12.500.000	2	15.000.000	2	17.500.000	2	20.000.000		
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	1	1	10.000.000	1	12.500.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				7.150.000.000		6.750.000.000		6.750.000.000		6.750.000.000		10.750.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak (%)	50	58,33	7.150.000.000	62,5	6.750.000.000	66,67	6.750.000.000	70,83	6.750.000.000	75	10.750.000.000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				6.650.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		10.500.000.000		
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	8	2	6.650.000.000	1	6.500.000.000	1	6.500.000.000	1	6.500.000.000	1	10.500.000.000		
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				6.650.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		10.500.000.000		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	8	2	6.650.000.000	1	6.500.000.000	1	6.500.000.000	1	6.500.000.000	1	10.500.000.000		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				500.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				500.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				211.179.810		292.679.810		319.279.810		341.879.810		364.479.810		
Terkendalinya harga bahan pokok	Koefisien laju harga bapokting (Angka)	12,4	11,95	211.179.810	11,65	292.679.810	11,3	319.279.810	10,9	341.879.810	10,45	364.479.810	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	90	90		90		90		90		90			
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				30.000.000		37.500.000		45.000.000		52.500.000		60.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya laporan koordinasi dan laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	4	4	30.000.000	4	37.500.000	4	45.000.000	4	52.500.000	4	60.000.000		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	4	4		4		4		5		4			
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	4	4	10.000.000	4	12.500.000	4	15.000.000	5	17.500.000	4	20.000.000		
3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan	4	4	10.000.000	4	12.500.000	4	15.000.000	4	17.500.000	4	20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)													
3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	4	4	10.000.000	4	12.500.000	4	15.000.000	4	17.500.000	4	20.000.000		
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				79.423.560		148.423.560		162.523.560		172.623.560		182.723.560		
Tersedianya laporan Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler untuk harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	79.423.560	4	148.423.560	4	162.523.560	4	172.623.560	4	182.723.560		
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				39.793.560		46.293.560		49.893.560		53.493.560		57.093.560		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	39.793.560	4	46.293.560	4	49.893.560	4	53.493.560	4	57.093.560		
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				15.000.000		17.500.000		20.000.000		22.500.000		25.000.000		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	4	4	15.000.000	4	17.500.000	4	20.000.000	4	22.500.000	4	25.000.000		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				24.630.000		84.630.000		92.630.000		96.630.000		100.630.000		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	24.630.000	4	84.630.000	4	92.630.000	4	96.630.000	4	100.630.000		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				101.756.250		106.756.250		111.756.250		116.756.250		121.756.250		
Tersedianya kelengkapan legalitas perizinan dan laporan pengawasan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida	4	4	101.756.250	4	106.756.250	4	111.756.250	4	116.756.250	4	121.756.250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pupuk dan pestisida bersubsidi	Bersubsidi (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
3.30.04.2.03.0001 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				15.000.000		17.500.000		20.000.000		22.500.000		25.000.000		
Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	4	4	15.000.000	4	17.500.000	4	20.000.000	4	22.500.000	4	25.000.000		
3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				15.000.000		17.500.000		20.000.000		22.500.000		25.000.000		
Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	4	4	15.000.000	4	17.500.000	4	20.000.000	4	22.500.000	4	25.000.000		
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				71.756.250		71.756.250		71.756.250		71.756.250		71.756.250		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	4	4	71.756.250	4	71.756.250	4	71.756.250	4	71.756.250	4	71.756.250		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				120.338.000		145.000.000		170.000.000		195.000.000		215.000.000		
Meningkatnya nilai ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor (%)	0,68	2	120.338.000	3,5	145.000.000	5,5	170.000.000	8	195.000.000	11,5	215.000.000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				120.338.000		145.000.000		170.000.000		195.000.000		215.000.000		
Meningkatnya Citra Produk ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	35	2	13.702.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				13.702.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	35	2	13.702.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada pelaksanaan Promosi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	2	2	106.636.000	3	130.000.000	4	150.000.000	5	170.000.000	6	190.000.000		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	2	2		3		4		5		6			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2	6		6		6		6		6			
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	2	2	25.000.000	3	30.000.000	4	35.000.000	5	40.000.000	6	45.000.000		
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				15.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	2	2	15.000.000	3	25.000.000	4	30.000.000	5	35.000.000	6	40.000.000		
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				66.636.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2	6	66.636.000	6	75.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000	6	105.000.000		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				450.000.000		525.000.000		600.000.000		675.000.000		675.000.000		
Meningkatkannya jaminan perlindungan konsumen melalui kepatuhan pemilik UTTP melakukan tera/tera ulang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	89,12	90	450.000.000	91	525.000.000	92	600.000.000	93	675.000.000	94	675.000.000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				450.000.000		525.000.000		600.000.000		675.000.000		675.000.000		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	8.761	8.950	300.000.000	9.150	325.000.000	9.350	350.000.000	9.550	375.000.000	9.831	375.000.000		
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				300.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000		375.000.000		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	8.761	8.950	300.000.000	9.150	325.000.000	9.350	350.000.000	9.550	375.000.000	9.831	375.000.000		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	120	760	150.000.000	770	200.000.000	780	250.000.000	790	300.000.000	800	300.000.000		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	120	760	150.000.000	770	200.000.000	780	250.000.000	790	300.000.000	800	300.000.000		
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				552.235.170		700.000.000		735.000.000		770.000.000		830.000.000		
Meningkatnya perluasan pemasaran perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang terakses pasar (%)	11,08	13,61	552.235.170	14,87	700.000.000	16,14	735.000.000	17,41	770.000.000	18,67	830.000.000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				552.235.170		700.000.000		735.000.000		770.000.000		830.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan promosi pada produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	10	10	552.235.170	10	700.000.000	10	735.000.000	10	770.000.000	10	830.000.000		
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	175	90		115		140		165		175			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	5	5		5		5		5		5			
3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	5	5	15.000.000	5	20.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000		
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				512.235.170		650.000.000		675.000.000		700.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	175	90	512.235.170	115	650.000.000	140	675.000.000	165	700.000.000	175	750.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	10	10	25.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	10	45.000.000		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				15.480.175.979		16.473.796.606		17.175.317.021		18.068.224.197		18.804.452.052		
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.471.149.059		15.502.816.606		16.195.587.021		16.969.514.197		17.784.752.052		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	82,3	82,32	14.471.149.059	82,34	15.502.816.606	82,36	16.195.587.021	82,38	16.969.514.197	82,4	17.784.752.052	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan substansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	3	70.000.000	3	80.000.000	3	90.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	17	14				14		14		14			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	8		8		8		8		8			
3.31.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	17	14	40.000.000		45.000.000	14	50.000.000	14	55.000.000	14	60.000.000		
3.31.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000		
3.31.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	3	20.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000		
3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.437.149.059		9.912.816.606		10.159.587.021		10.412.514.197		10.671.752.052		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	64	59	9.376.149.059	59	9.850.816.606	59	10.097.087.021	59	10.349.514.197	59	10.608.252.052		
3.31.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.376.149.059		9.850.816.606		10.097.087.021		10.349.514.197		10.608.252.052		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	64	59	9.376.149.059	59	9.850.816.606	59	10.097.087.021	59	10.349.514.197	59	10.608.252.052		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	25	25	61.000.000	25	62.000.000	25	62.500.000	25	63.000.000	25	63.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60	60		60		60		60		60			
3.31.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				51.000.000		52.000.000		52.500.000		53.000.000		53.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60	60	51.000.000	60	52.000.000	60	52.500.000	60	53.000.000	60	53.500.000		
3.31.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.31.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	25	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000		
3.31.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000		
3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				315.000.000		315.000.000		315.000.000		315.000.000		315.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	59		59		59		59		59			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	59		59		59		59		59			
3.31.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
3.31.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pera-	0	59	50.000.000	59	50.000.000	59	50.000.000	59	50.000.000	59	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	turan Perundang-Undangan (Orang)													
3.31.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	59	100.000.000	59	100.000.000	59	100.000.000	59	100.000.000	59	100.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	59	65.000.000	59	65.000.000	59	65.000.000	59	65.000.000	59	65.000.000		
3.31.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	59	65.000.000	59	65.000.000	59	65.000.000	59	65.000.000	59	65.000.000		
Tersusunnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
3.31.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.404.000.000		1.500.000.000		1.596.000.000		1.692.000.000		1.788.000.000		
tersedianya peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang layak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	810.000.000	8	875.000.000	8	940.000.000	8	1.005.000.000	8	1.070.000.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	25		30		35		40		45			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
3.31.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	25	10.000.000	30	15.000.000	35	20.000.000	40	25.000.000	45	30.000.000		
3.31.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
3.31.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		240.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	200.000.000	8	210.000.000	8	220.000.000	8	230.000.000	8	240.000.000		
3.31.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	500.000.000	10	550.000.000	10	600.000.000	10	650.000.000	10	700.000.000		
tersusunnya laporan penatusahaan perkantoran yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	594.000.000	1	625.000.000	1	656.000.000	1	687.000.000	1	718.000.000		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
3.31.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36	9.000.000	36	10.000.000	36	11.000.000	36	12.000.000	36	13.000.000		
3.31.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
3.31.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		525.000.000		550.000.000		575.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	500.000.000	1	525.000.000	1	550.000.000	1	575.000.000	1	600.000.000		
3.31.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.31.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sis-	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Berbasis Elektronik pada SKPD	tem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)													
3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.750.000.000		1.965.000.000		2.060.000.000		2.230.000.000		2.410.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	1.750.000.000	2	1.965.000.000	2	2.060.000.000	2	2.230.000.000	2	2.410.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	49	20		20		20		20		20			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	101	50		20		30		50		100			
3.31.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
3.31.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				750.000.000		850.000.000		900.000.000		950.000.000		1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	750.000.000	5	850.000.000	5	900.000.000	5	950.000.000	5	1.000.000.000		
3.31.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	10	50.000.000	10	60.000.000	10	70.000.000	10	80.000.000	10	90.000.000		
3.31.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000		20.000.000		30.000.000		50.000.000		100.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	101	50	50.000.000	20	20.000.000	30	30.000.000	50	50.000.000	100	100.000.000		
3.31.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		330.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	49	20	200.000.000	20	330.000.000	20	350.000.000	20	400.000.000	20	450.000.000		
3.31.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		155.000.000		160.000.000		200.000.000		220.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	150.000.000	2	155.000.000	2	160.000.000	2	200.000.000	2	220.000.000		
3.31.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				980.000.000		1.060.000.000		1.140.000.000		1.220.000.000		1.325.000.000		
Tersedianya jasa pelayanan Perkantoran yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	980.000.000	1	1.060.000.000	1	1.140.000.000	1	1.220.000.000	1	1.325.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.31.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.31.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		400.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	275.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000		
3.31.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000		
3.31.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				650.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000	1	850.000.000		
3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				505.000.000		655.000.000		815.000.000		975.000.000		1.135.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	505.000.000	1	655.000.000	1	815.000.000	1	975.000.000	1	1.135.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	53	50		60		60		60		60			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	84	30		50		50		50		50			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	10		10		10		10		10			
3.31.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Ken-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
daraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)													
3.31.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.000.000		90.000.000		120.000.000		150.000.000		175.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21	85.000.000	21	90.000.000	21	120.000.000	21	150.000.000	21	175.000.000		
3.31.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	10	10.000.000	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000		
3.31.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	84	30	30.000.000	50	50.000.000	50	60.000.000	50	70.000.000	50	80.000.000		
3.31.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	53	50	50.000.000	60	60.000.000	60	65.000.000	60	70.000.000	60	80.000.000		
3.31.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		
3.31.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000		
3.31.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				776.984.800		798.500.000		790.000.000		775.000.000		790.000.000		
Meningkatnya kualitas produk industri	Persentase produk IKM yang bersertifikasi (%)	2,94	7,51	25.840.000	11	28.500.000	14	40.000.000	17	45.000.000	20	50.000.000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				776.984.800		798.500.000		790.000.000		775.000.000		790.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	2	25.840.000	2	28.500.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000		
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				25.840.000		28.500.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	2	25.840.000	2	28.500.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000		
Meningkatnya penggunaan sarpras yang berkualitas	Persentase IKM yang memiliki	58	60	71.144.800	62	105.000.000	65	125.000.000	67	150.000.000	70	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUT-COME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sarana prasa-rana produksi dalam kondisi baik (%)													
3.31.02.2.01 - Penyusu-nan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				776.984.800		798.500.000		790.000.000		775.000.000		790.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pem-bangunan Industri	Jumlah Doku-men Hasil Koordinasi, Sink-ronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Indus-tri (Dokumen)	2	2	71.144.800	2	105.000.000	2	125.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pem-bangunan Sarana dan Prasarana Industri				71.144.800		105.000.000		125.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terselenggaranya Koordi-nasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pem-bangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Doku-men Hasil Koordinasi, Sink-ronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Indus-tri (Dokumen)	2	2	71.144.800	2	105.000.000	2	125.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000		
Meningkatnya pertumbuhan usaha industri	Persentase per-tambahan jumlah industri kecil dan menen-gah di kabupaten (%)	2,1	2,3	335.000.000	2,4	480.000.000	2,5	350.000.000	2,6	360.000.000	2,7	365.000.000		
3.31.02.2.01 - Penyusu-nan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				776.984.800		798.500.000		790.000.000		775.000.000		790.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pem-bangunan Industri	Jumlah Doku-men Hasil Koordinasi, Sink-ronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3	2	335.000.000	2	480.000.000	2	350.000.000	2	360.000.000	2	365.000.000		
	Jumlah Doku-men Rencana Pembangunan Industri (Doku-men)	0	0		1		0		0		0			
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				0		135.000.000		0		0		0		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Doku-men Rencana Pembangunan	0	0	0	1	135.000.000	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Industri (Dokumen)													
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				335.000.000		345.000.000		350.000.000		360.000.000		365.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3	2	335.000.000	2	345.000.000	2	350.000.000	2	360.000.000	2	365.000.000		
Meningkatnya produk IKM yang diajukan sertifikasi	Persentase produk IKM yang layak difasilitasi sertifikasi (%)	100	100	120.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	145.000.000		
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				776.984.800		798.500.000		790.000.000		775.000.000		790.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	2	120.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	2	145.000.000		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				120.000.000		125.000.000		130.000.000		140.000.000		145.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	2	120.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	2	145.000.000		
Terbentuknya perwilayahan industri	Persentase perwilayahan industri yang terbentuk (%)	24	35	225.000.000	47	60.000.000	53	145.000.000	59	80.000.000	71	80.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				776.984.800		798.500.000		790.000.000		775.000.000		790.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan)	0	1	225.000.000	0	60.000.000	1	145.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000		
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)													
	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)													
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan				52.500.000		60.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	0	1	52.500.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				122.500.000		0		0		0		0		
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	1	122.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.31.02.2.01.0007 - Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0		0		0		0		0		
Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)			0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				50.000.000		0		70.000.000		0		0		
Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan	Data dan informasi dalam rangka evaluasi	0	1	50.000.000	0	0	1	70.000.000	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penyebaran dan perwilayahan industry	percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan)													
3.31.02.2.01.0010 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0		0		0		0		0		
Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industry	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)			0		0		0		0		0		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				72.981.060		80.180.000		88.200.000		97.030.000		106.700.000		
Meningkatnya kemudahan perizinan IKM	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	77	80	72.981.060	81	80.180.000	82	88.200.000	83	97.030.000	84	106.700.000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				72.981.060		80.180.000		88.200.000		97.030.000		106.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	6	8	72.981.060	8	80.180.000	8	88.200.000	9	97.030.000	9	106.700.000		
	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				33.800.000		37.180.000		40.900.000		45.000.000		49.500.000		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	0	1	33.800.000	1	37.180.000	1	40.900.000	1	45.000.000	1	49.500.000		
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				39.181.060		43.000.000		47.300.000		52.030.000		57.200.000		
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha	6	8	39.181.060	8	43.000.000	8	47.300.000	9	52.030.000	9	57.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)													
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				159.061.060		92.300.000		101.530.000		226.680.000		123.000.000		
Meningkatnya kepatuhan pelaporan usaha industri	Persentase usaha industri yang patuh melaporkan dalam SIINAS (%)	25	25	159.061.060	26	92.300.000	27	101.530.000	27	226.680.000	28	123.000.000	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				159.061.060		92.300.000		101.530.000		226.680.000		123.000.000		
Tersedianya Informasi Industri dan Pengelolaan Data Dalam SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	2	2	159.061.060	2	92.300.000	2	101.530.000	2	226.680.000	2	123.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	0	1		0		0		1		0			
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				45.721.060		50.300.000		55.330.000		60.860.000		67.000.000		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	2	45.721.060	2	50.300.000	2	55.330.000	2	60.860.000	2	67.000.000		
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				78.340.000		0		0		115.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	0	1	78.340.000	0	0	0	0	1	115.000.000	0	0		
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				35.000.000		42.000.000		46.200.000		50.820.000		56.000.000		
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	2	2	35.000.000	2	42.000.000	2	46.200.000	2	50.820.000	2	56.000.000		

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program terpilih yang secara teknokratik memiliki kontribusi besar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Program prioritas merupakan elaborasi antara program utama pendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diselaraskan dengan 15 (Lima Belas) Program Prioritas Kepala Daerah. Implementasi program prioritas diharapkan dapat menjadi langkah percepatan (Quick Win) bagi pencapaian tujuan pembangunan lebih efektif dan efisien. Berikut disajikan Program Unggulan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang harus diimplementasikan selama periode pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029.

Tabel 4.3
Visi, Misi dan Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk

Visi	Misi (M)	Program Unggulan (PU)	Perangkat Daerah	
			Pengampu	Pendukung
Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat	(M.5) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal	(PU.8) Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional	a. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional (Dinas Indag)	a. Daya saing perindustrian (Dinas Indag)

Dengan didukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
1.	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kepatuhan perizinan pelaku usaha perdagangan	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
			3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			3.30.02.2.01.0002 - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
			3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
			3.30.02.2.03.0001 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
			3.30.02.2.03.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	
			3.30.02.2.03.0003 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	
			3.30.02.2.03.0004 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	
			3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
			3.30.02.2.04.0001 - Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	
			3.30.02.2.04.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	
			3.30.02.2.04.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	
			3.30.02.2.04.0004 - Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	
			3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
			3.30.02.2.05.0001 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
			3.30.02.2.05.0002 - Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
			3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	
			3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
2.	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
3.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terkendalinya harga bahan pokok	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.03.0001 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
			3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
4.	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya nilai ekspor	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
			3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	
			3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
5.	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatkannya jaminan perlindungan konsumen melalui kepatuhan pemilik UTTP melakukan tera/tera ulang	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
6.	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya perluasan pemasaran perdagangan	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
			3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
7.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya penggunaan sarpras yang berkualitas	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		Terbentuknya perwilayahan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas produk industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya produk IKM yang diajukan sertifikasi	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pertumbuhan usaha industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		Terbentuknya perwilayahan industri	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
		Meningkatnya produk IKM yang diajukan sertifikasi	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
		Meningkatnya penggunaan sarpras yang berkualitas	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
		Meningkatnya pertumbuhan usaha industri	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		Terbentuknya perwilayahan industri	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			3.31.02.2.01.0007 - Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
		Meningkatnya kualitas produk industri	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
		Terbentuknya perwilayahan industri	3.31.02.2.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			3.31.02.2.01.0010 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
8.	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kemudahan perizinan IKM	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
9.	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya kepatuhan pelaporan usaha industri	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
			3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 yang diemban Kabupaten Nganjuk yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2024. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nganjuk adalah: "Nganjuk Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan". Dengan misi ke 5 **"Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal"**

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Nganjuk secara umum, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada khususnya dalam keterkaitan tehadap peran Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Adapun tujuan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten

Nganjuk tahun 2025-2029 adalah :

"Meningkatnya nilai tambah sektor Perindustrian dan Perdagangan"

Dengan indikator kinerja

1.Rasio PDRB (ADHK) Sektor Industri Pengolahan

2.Rasio PDRB (ADHK) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Baseline Data Rasio PDRB (ADHK) sector Industri Pengolahan dan Rasio PDRB (ADHK) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2024 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalambentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Produktivitas Industri dengan Indikator : Persentase peningkatan nilai produksi Industri

   Alasan : Untuk Mengukur Peningkatan nilai produksi yang ada di Kabupaten Nganjuk

   Sumber Data : Bidang Perindustrian

   Data dasar pada indicator ini Diperoleh dari Updating Data Tahun 2021 Yang dimaksud Nilai Produksi adalah Tingkat produksi, atau jumlah barang yang dihasilkan dari industri.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Perdagangan dengan Indikator : Persentase Peningkatan Nilai sector Perdagangan

   Alasan : Untuk mengukur Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk

Indikatornya kinerja utamanya dapat dilihat pada tabel 4.5 Sebagai Berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan									
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	15,92	16,27	16,61	16,96	17,3	17,65	17,71	
3.	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	20,53	20,54	20,55	20,57	20,60	20,62	20,64	
4.	Persentase peningkatan Nilai Produksi industri	%	2,15	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	
5.	Persentase peningkatan Nilai sektor perdagangan	%	6,61	6,78	6,96	7,14	7,33	7,51	7,69	

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicators* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Indikator Kinerja Kunci yang mendukung tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Indikator Kinerja Kunci Merupakan indicator yang menggambarkan keberhasilan Penyelenggaraan suatu urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan. Adapun definisi dan formulasi perhitungan indicator Kinerja Kunci mengikuti pedoman umum Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Base line data tahun 2024 diperoleh dari realisasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Indikator kinerja Kunci dan target dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
1.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	positif	%	89,12	90	90	91	92	93	94	
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	positif	%	81,96	90	90	90	90	90	90	
3.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	positif	%	22,86	24,86	26,86	28,86	30,86	32,86	34,86	
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
4.	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	positif	%	2,15	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	
5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	positif	%	77	79	80	81	82	83	84	
6.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	positif	%	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001